



► NUTHUK HARGA

Kerap Mengimbau Dikira Juweh

DANUREJAN—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan sudah tidak ada alasan lagi bagi pedagang di Malioboro untuk tidak memasang harga agar tidak muncul istilah *nuthuk*. Kebiasaan tarif atau harga *nuthuk* ini sering kali terjadi di Malioboro terutama saat musim liburan.

Sunartono & Sirojuri
redaksi@harianjogja.com

Kasus *nuthuk* harga menjadi salah satu yang diantisipasi Pemda DIY dalam momentum libur Lebaran 2022. Sultan HB X menilai seharusnya para pedagang di Malioboro sudah memahami karena ditempatkan di Teras Malioboro. Secara otomatis mereka memberikan daftar harga terutama menu makanan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pedagang untuk tidak menyediakan daftar harga kepada pembeli.

"Itu sebetulnya masyarakat [pedagang] sudah tahu makanya kami coba untuk makan di Teras Malioboro itu juga menunya sudah ada [harganya]. Semua mestinya, tidak ada alasan lagi tidak menyediakan daftar harga," kata Sultan di kompleks Kepatihan, Senin (18/4).

Saat diminta imbauan untuk pedagang, Sultan mengatakan seharusnya para pedagang sudah sadar dan tidak perlu imbauan secara terus menerus karena sudah menjadi tanggung jawabnya.

"Mestinya [pedagang] sudah lebih menyadari. *Nek aku mengimbau, aku dikira juweh [cerewet], mosok kesadaran bola-bali terus menerus tidak maju-maju.*" katanya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo menyatakan jawabannya sudah

► Sultan HB X menilai seharusnya para pedagang di Malioboro sudah memahami memberikan daftar harga karena ditempatkan di Teras Malioboro.

► Bagi masyarakat yang hendak melapor atas hal-hal yang merugikan, bisa menggunakan JSS atau ke petugas Jogoboro.

berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan rasa aman kepada wisatawan saat Lebaran. Terutama mengantisipasi harga *nuthuk*. Dengan ditematkannya di Teras Malioboro saat ini memudahkan dilakukan pemantauan.

Dikeluarkan

Terkait dengan pencegahan kasus *nuthuk* harga oleh pedagang, Pemkot Jogja semakin memaksimalkan Tim Respons Cepat. Terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), tim ini akan menindaklanjuti laporan atau keluhan masyarakat, terutama dalam hal yang terkait aktivitas wisata di Jogja.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan, sudah ada standar operasional yang jelas. Setelah mengklarifikasi laporan terkait dengan kebenarannya, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan saat itu juga.

"Keputusan sementara atau permanen untuk tidak boleh beroperasi di Kawasan Malioboro atau kawasan lainnya. Pemkot Jogja tidak akan memberikan toleransi sedikit pun," kata Heroe, Senin (18/4).

Bagi masyarakat yang hendak melapor atas hal-hal yang merugikan, bisa menggunakan aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) atau langsung ke petugas Jogoboro di sepanjang Malioboro. Namun usahakan pelapor melampirkan bukti dan identitas yang jelas.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005